

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

Umi Kaifah<sup>1</sup>, Ayu Levia Tryana<sup>2</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Teknologi Sumbawa  
kaifahumi17@gmail.com

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the effect of the adoption of accrual-based government accounting standards, internal control systems, apparatus competence on the quality of empirical study regional government financial reports on the Sumbawa district government. The target population in this study are staff who are directly involved in recording financial transactions and preparing financial reporting at the Sumbawa Regency Regional Apparatus Organization. The number of samples in this study were 64 respondents, with data collection done through a questionnaire. This research was tested using SPSS version 21. The results showed that the application of accrual-based government accounting standards and internal control systems didn't significantly influence the quality of financial statements. While the competence of the apparatus has a positive and significant effect on the quality of financial statements.*

**Keywords: Application, Competence, Control, LKPD Quality**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah staf yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sumbawa. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 64 responden, dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Penelitian ini diuji menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.*

**Kata Kunci: Penerapan, Kompetensi, Pengendalian, Kualitas LKPD**

## **I. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang aparatur berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Upaya mewujudkan hal tersebut yaitu pelaksanaan tugas jabatan dalam penatausahaan keuangan secara profesional, efektif, dan efisien sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2007.

Fenomena atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Temuan tersebut didominasi pada lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah utamanya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun. Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Kabupaten Sumbawa tahun 2017 masih ada sejumlah perangkat daerah yang masih perlu penataan dan penyempurnaan terhadap pengelolaan aset pemerintah Kabupaten berupa lahan dan kendaraan yang tidak jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang pengendalian intern terhadap pengamanan aset Negara. (ntb.bpk.go.id, 2017)

Hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat oleh M. Ali Fikri, dkk (2016) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal, dengan sistem pengendalian internal sebagai variable moderating tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian Herawati dan Novianti, (2017) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa “.

## **II. TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdapat empat prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

### **Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI (SAP AkruaI)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, "Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah." Standar Akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum.

### **Kompetensi Aparatur**

Menciptakan sumber daya manusia atau aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan sesuai dengan yang tercantum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 46A tahun 2007.

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukandilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan keataatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Rifa'I Nasution (2016) pada Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Syarifa Hannum Hasibuan (2018) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas menunjukkan hasil Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Padang Lawas. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI diyakini berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil hipotesis yaitu :

**H<sub>1</sub>:** Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Penelitian yang Manusia dan dilakukan oleh RoviYanti (2011) menunjukkan bahwa kompetensi Sumber Daya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Ulfa Rima Nugraheta (2017) diperoleh hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Surakarta. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menarik hipotesis bahwa terdapat hubungan antara peningkatan kompetensi aparatur terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dengan hipotesis.

**H<sub>2</sub>:** kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2013) menyatakan bahwa penerapan pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Novtania Mokoginta, Linda Lambey, Winston Pontoh (2017) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas kegiatan operasi (Sari, 2012). Berdasarkan uraian tersebut peneliti menarik hipotesis yaitu:

**H<sub>3</sub>:** Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain kausal “Desain ini berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antar variabel riset atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variable mempengaruhi variabel lain” (Umar, 2003).

### **Populasi**

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah staf yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah serta telah mengikuti pelatihan oleh pemerintah daerah. Dipilihnya Organisasi Perangkat Daerah karena merupakan entitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Sampel**

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik penentuan sampel secara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini yaitu 2 (dua) orang dari bagian Akuntansi yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan serta pernah mengikuti pelatihan dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuisioner. Pengambilan data dilakukan dengan memberikan kuisioner kepada para pegawai di bidang akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan jumlah kuisioner yang disebar sebanyak 64 kuisioner. Hasil kuisioner diolah dengan alat bantu analisis data berupa aplikasi SPSS 21.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Analisis Data

##### Uji Validitas

Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai *Corrected Item Total Correlation*. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%) maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 64 responden dan besarnya df dapat dihitung  $64-2=62$  dengan df = 62 dan alpha = 0,05 didapat r tabel = 0,2461. Jadi, item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2461. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

**Tabel 1**

Hasil Uji Validitas

Variable	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua	SAP1	0.277	0.2461	Valid
	SAP2	0.633	0.2461	Valid
	SAP3	0.405	0.2461	Valid
	SAP4	0.365	0.2461	Valid
	SAP5	0.578	0.2461	Valid
	SAP6	0.522	0.2461	Valid
	SAP7	0.383	0.2461	Valid
	SAP8	0.350	0.2461	Valid
	SAP9	0.252	0.2461	Valid
	SAP10	0.340	0.2461	Valid
Kompetensi Aparatur	KA1	0.278	0.2461	Valid
	KA2	0.535	0.2461	Valid
	KA3	0.424	0.2461	Valid
	KA4	0.755	0.2461	Valid
	KA5	0.804	0.2461	Valid
	KA6	0.744	0.2461	Valid
	KA7	0.405	0.2461	Valid
	KA8	0.566	0.2461	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SPIP1	0.624	0.2461	Valid
	SPIP2	0.659	0.2461	Valid
	SPIP3	0.665	0.2461	Valid
	SPIP4	0.680	0.2461	Valid
	SPIP5	0.818	0.2461	Valid
	SPIP6	0.644	0.2461	Valid
	SPIP7	0.699	0.2461	Valid
	SPIP8	0.548	0.2461	Valid
	SPIP9	0.518	0.2461	Valid
	LK1	0.416	0.2461	Valid
	LK2	0.449	0.2461	Valid
	LK3	0.293	0.2461	Valid
	LK4	0.465	0.2461	Valid

Kualitas Laporan Keuangan	LK5	0.483	0.2461	Valid
	LK6	0.456	0.2461	Valid
	LK7	0.556	0.2461	Valid
	LK8	0.749	0.2461	Valid
	LK9	0.645	0.2461	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2020

Tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada  $r$ -tabel 0,2461. Hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

### Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrumen dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan reabilitas sebesar 0,70 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Hasil
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0.711	Reliabel
2	Kompetensi Aparatur	0.837	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0.891	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan	0.804	Reliabel

Sumber: Data primer diolah tahun 2020

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas data secara statistik, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas.

### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Hasil uji statistik menggunakan nilai *Kolmogorov-smirnov*. Dari Tabel 3 dapat dilihat signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,947 hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.37675649
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negatif	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.523
Asymp. Sig. (2-tailed)		.947

a. Test distribution is Normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor (VIF)*, Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.

**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.970	1.031
Kompetensi Aparatur	.729	1.371
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.746	1.341

a. Devendent Variabel: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4 diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari pada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heteroskedastisitas ini dapat dilakukan dengan uji park. Hasil pengujiannya akan disajikan dalam Tabel 5. Jika nilai signifikansi

lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas- Uji Park**

Model	t	Sig.
(Constant)	.171	.865
1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	-.338	.737
Kompetensi Aparatur	.797	.429
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-.724	.472

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 ( 2020 )

Hasil uji Park pada Tabel di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas untuk semua variabel independen tingkat signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

#### Analisis linear berganda

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Variabel	Koefisien Regresi	T <sub>hitung</sub>	T <sub>sig</sub>	R <sup>2</sup>	F <sub>sig</sub>
(Constant)	19.994	6.175	.000	.423	.000
1 SAP	-.001	-.053	.958		
SPIP	-.077	-.898	.373		
KA	.548	6.126	.000		

Sumber : Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada tabel diatas diperoleh persamaan model regresi yaitu:

$$KLKPD = \alpha + \beta_1PSAP+ \beta_2KA + \beta_3SPIP$$

Dimana:

KLKPD = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Beta

PSAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

SPIP = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KA = Kompetensi Aparatur

Sehingga:

$$KLKPD = 19.994 - 0.001 SAP - 0,077 SPIP + 0.548 KA$$



Dari model regresi dapat dijelaskan bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah akan bernilai tetap atau konstan apabila tidak ada kenaikan atau penurunan nilai dari variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi berbasis akrual, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Jika terjadi perubahan pada variabel kompetensi aparatur berdasarkan hasil analisis model agresi diatas maka akan berpengaruh pada kenaikan atau penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.651 <sup>a</sup>	.423	.394	2.43545

a. Predictors: (Constant), KA, SAP, SPIP

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai  $R^2$  (*Adjusted R square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen). Dari Tabel 7 diatas diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,394, hal ini berarti bahwa 39,4% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal. Sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

### Uji T

**Tabel 8**  
**Hasil Uji T**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	t	Sig.
1 (Constant)	6.175	.000
Standar Akuntansi Pemerintah	-.053	.958
Kompetensi Aparatur	6.126	.000
Sistem Pengendalian Internal	-.898	.373

Sumber: Output SPSS 21

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian ( $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$ ) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

**Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H<sub>1</sub>).**

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki tingkat signifikan  $t$  sebesar 0,958 yang lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel penerapan standar akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual tidak membawa pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syarif Hanum Hasibuan (2018) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas yang menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Padang Lawas.

**Kompetensi Aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H<sub>2</sub>).**

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel kompetensi aparatur menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti variabel kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) yang menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbukti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin berkualitasnya para pegawai keuangan yang ada di Kabupaten Sumbawa maka akan membuat laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Roviyanti (2011) yang menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, pelatihan, pengalaman, skill atau keterampilannya yang dimiliki seorang akuntan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dengan demikian akuntan dapat mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah dalam pembuatan laporan keuangan berbasis akrual secara semakin mendalam.

**Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (H<sub>3</sub>).**

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian internal tingkat signifikannya 0,373 yang lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terbukti.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ada di Kabupaten Sumbawa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novtania Mokoginta dkk (2017) yang membuktikan bahwa

sistem pengendalian internal berpengaruh negative signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. penerapan standar akuntansi pemerintah tersebut belum maksimal dilakukan sehingga pengaruh yang ditimbulkan dari adanya penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Sumbawa.
2. Kompetensi Aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, pelatihan, pengalaman, skill atau keterampilan yang dimiliki seorang akuntan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa. Hal ini juga menunjukkan kurang efektifnya sistem pengendalian intern yang diterapkan di organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

### Saran

Implikasi yang diharapkan dari penelitian ini adalah peneliti lain atau peneliti berikutnya diharapkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang dan bagi pembuat keputusan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Pengembangan penelitian dapat diarahkan pada eksplorasi faktor-faktor lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, dan lain-lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan model regresi penelitian yang dapat memprediksi secara lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, S. H. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah . *Skripsi dipublikasikan*, Universitas Kementerian Hukum dan HAM. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Kementerian Hukum dan HAM. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil
- Kusufi, A. H. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mokoginta, N. d. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Going Concern*, 874-890.
- Nasution, A. R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi dipublikasikan*, Repository.usu.ac.id.
- Pujanira, P dan Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*. Vol. 6 No. 2
- Puspitawati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten kota di Provinsi Lampung. *Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*, Bandar Lampung.
- Suaryana, I. W. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Akuntansi*, Universitas Udayana.